

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2018**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 Kabupaten Sampang. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan *good governance*. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;

3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan.

Selain beberapa fungsi tersebut, LKjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang tahun 2018 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Sampang, Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. DJUWARDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19600707 198603 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
D. DASAR HUKUM	18
E. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS	21
B. PROGRAM DAN KEGIATAN	24
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	28
B. CAPAIAN KINERJA	30
C. ANALISISI CAPAIAN KINERJA	31
D. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD	36
E. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017	38
A.	
BAB IV PENUTUP	47
A. TINJAUAN UMUM	47
B. TINJAUAN KHUSUS	47
C. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	48
D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	48
E. SARAN DAN REKOMENDASI	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perubahannya. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah menyusun sebuah laporan guna mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut beserta capaiannya bertujuan untuk :

1. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas sekaligus peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sendiri;
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diemban dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus sebagai sarana evaluasi bagi setiap program dan kegiatan-kegiatan Dinas;
3. Menciptakan *self-assessment* (penilaian diri) yang diharapkan akan memberikan koreksi, perbaikan dan dorongan (*feed back*) untuk kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Sampang;
2. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, untuk kemudian diharapkan dapat memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang terbagi secara terinci yang terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.

Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (“maintenance”);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Kepala Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan Informasi Publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Perencanaan, perumusan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan Informasi Publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengelolaan layanan informasi media publik dan opini publik;
- e. Pelaksanaan diseminasi informasi pembangunan nasional/daerah;
- f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan/atau penilaian kelompok informasi masyarakat;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kemitraan media lokal, media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :

- 1) Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan, perumusan, pelaksanaan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - b. Penyelenggarakan layanan pengelolaan informasi dan opini publik serta analisis isu publik;
 - c. Melaksanakan Koordinasi kelembagaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan informasi publik;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten guna mendapatkan bahan sajian layanan informasi publik;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP); dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Seksi Kemitraan dan Media Publik, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruang;
 - b. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi secara langsung (*Interpersonal communication*);
 - c. Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui penyertaan pameran/promosi;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang kemitraan lembaga komunikasi publik;
 - e. Melaksanakan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
 - f. Melaksanakan pengelolaan radio milik pemerintah daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- 3) Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah , mempunyai tugas :
- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;
 - b. Melaksanakan Pengembangan, pembinaan dan penilaian Kelompok Informasi Masyarakat;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan pendayagunaan lembaga komunikasi sosial dan media tradisional (pentura);
- d. Memfasilitasi pemberdayaan komunitas komunikasi strategis yang berkembang di masyarakat;
- e. Melaksanakan kebijakan komunitas komunikasi berdasarkan kesetaraan gender;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi jaringan komunikasi pemerintah dan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

d. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknolgi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Keamanan Data Pemerintah Kabupaten Sampang;
- d. Pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- e. Pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi *generik, spesifik* dan Suplemen yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*;
- g. Pelaksanaan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan layanan keamanan informasi *e-Government*;

- i. Pelaksanaan layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Sampang;
- j. Pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :

- 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi, yang mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. Melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
 - c. Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - d. Melaksanakan pendaftaran dan pengelolaan nama *domain* Pemerintah Kabupaten Sampang dan menetapkan *sub domain* semua organisasi pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan sarana infrastruktur teknologi informasi pada semua Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - f. Melaksanakan pengelolaan dan distribusi *bandwidth* internet ke setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - g. Melaksanakan pengelolaan Tim *Disaster Recovery Center*;
 - h. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan *ekosistem Smart City* di Kabupaten Sampang; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2) Seksi Tata Kelola dan Penerapan e-Government, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Tata Kelola e-Government;
- b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Tata Kelola e-Government;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government;
- d. Melaksanakan perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *egovernment*;
- e. Menyusun bahan kerjasama antara satuan kerja, antar pemerintah propinsi dan pemerintah pusat dan non pemerintah;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan spesifikasi teknis pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *egovernment* dan *smart city*;
- h. Melaksanakan promosi *smart city*;
- i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3) Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan aplikasi teknologi informasi;
- b. Melaksanakan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perangkat lunak teknologi informasi;

- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- e. Melaksanakan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- g. Melaksanakan layanan manajemen data informasi *e-Government* dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Sampang;
- h. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, *Government Chief Information Officer (GCIO)*; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian persandian, statistik, evaluasi dan informasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan persandian;
- d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi persandian;
- e. Pelaksanaan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan persandian; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

1) Seksi Statistik, yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan statistik;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;
- d. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey pembangunan Kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan statistik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

2) Seksi Persandian, yang mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan persandian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis persandian;
- c. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan persandian;
- d. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- e. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil persandian;

- g. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan alat-alat persandian serta mengembangkan sistem dan alat-alat persandian;
- h. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- i. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

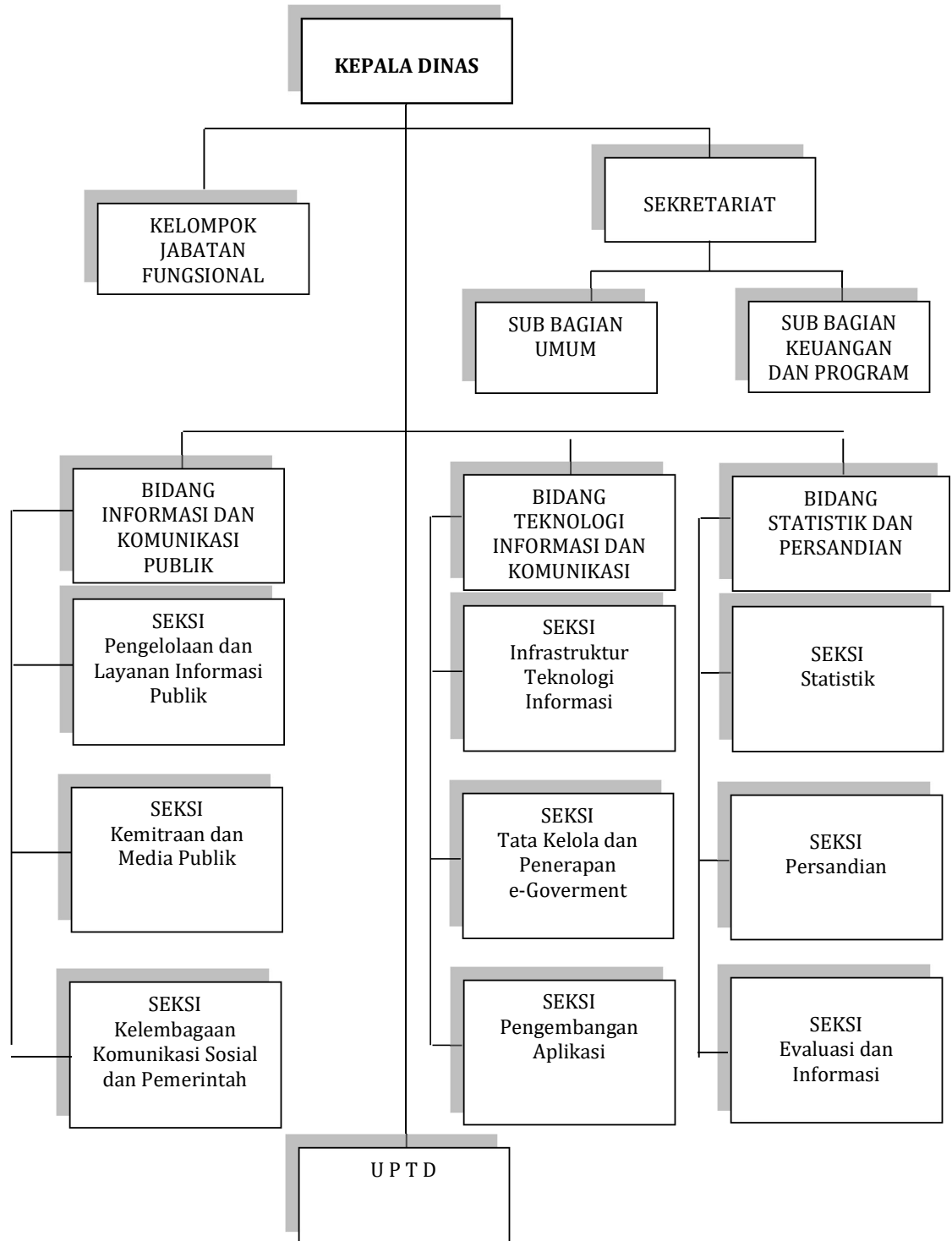
3) Seksi Evaluasi dan Informasi, yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan informasi data pembangunan Kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan evaluasi dan informasi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan evaluasi dan informasi;
- d. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya evaluasi dan informasi;
- e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya penguatan evaluasi dan informasi;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan evaluasi dan informasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG**



Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang memiliki jumlah pegawai sebanyak 33 Orang, berdasarkan jumlah tersebut 30 Orang atau 91 % berstatus PNS sisanya 3 Orang atau 9 % berstatus Non PNS atau Honorer.

TABEL - I.1
DATA JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMA	D I	D II	D III	SI	S 2	S3	JML
	Golongan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Golongan IV										
	IV / d										
	IV / c								1		
	IV / b							1			
	IV / a						1		4		
II	Golongan III										
	III / d			1				4			
	III / c			1				1	2		
	III / b			2				2			
	III / a							4			
III	Golongan II										
	II / d										
	II / c			3			1				
	II / b										
	II / a			2							
IV	Golongan I										
	I / d										
	I / c										
	I / b										
	I / a										
V	Tenaga Honorer			3							
JUMLAH				12			2	12	7		

TABEL - II.2
SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PENJENJANGAN

No	Uraian	Perkembangan Jumlah Tiga Tahun Terahir		
		2016	2017	2018
1	Spamen	-	1	1
2	Diklat Pim III/Spama	-	4	3
3	Dilat Pim IV/Adum	-	11	11

TABEL - II.3
SDM BERDASARKAN JABATAN

No	Uraian	Perkembangan Jumlah Tiga Tahun Terahir		
		2016	2017	2018
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II	-	1	1
3	Eselon III	-	4	3
4	Eselon IV	-	11	10
5	Staff	-	16	19
Jumlah			32	33

2. Sarana dan Prasarana

Aset Sarana Pendukung yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang diperoleh Dinas Perhubungan dan dinas-dinas yang lain karena adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah. Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada saat ini terhadap kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang masih kurang, belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel - I.4
Sarana Pendukung Komunikasi Dan Informatika

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang	
				Rusak	Baik
1	Website Pemerintah	Unit	1	-	1
2	Radio RSPD	Unit	1	-	1
3	Gedung Website	Unit	1	-	1
4	Papan Bahasa Arab	Unit	204	35	169
5	Papan Informasi	Unit	23	12	11
6	Perangkat Radio	Set	1	-	1
7	Tower Telekomunikasi	Unit	31	-	31
8	Server	Unit	5	2	3
9	Aplikasi Teknologi Informasi	Paket	4	-	4

Tabel - I.5
Sarana Pendukung Sebagai Kelancaran Tugas

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang	
				Rusak	Baik
1.	AC	Unit	25	1	24
2.	Camera	Unit	5	-	5
3.	Filing Kabinet	Unit	20	-	20
4.	Genset	Unit	1	-	1
5.	Komputer PC	Unit	15	-	15
6.	Printer	Unit	13	-	13
7.	Laptop	Unit	11	-	11
8.	Kursi Kerja	Unit	43	-	43
9	Kursi Rapat	Unit	65	-	65
10	Meja Kerja	Unit	39	-	39
11	Sofa Tamu	Unit	6	-	6
12	Lemari Arsip	Unit	12	-	12
13	Sepeda Motor	Unit	18	-	18
14	Televisi	Unit	1	-	1
15	Mobil Oprasional	Unit	3	-	3

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/XI/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Prlaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia serta sistematika penulisan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA menjelaskan mengenai rencana tujuan, sasaran, indikator pencapaian sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang serta rencana kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi yang telah ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA merupakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya mengurai secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV

PENUTUP mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2013-2018 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Pada perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 tidak terjadi perubahan pada Visi dan Misi serta Tujuan pembangunan Kabupaten Sampang, namun indikator tujuan sebagai indikator hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome terdapat perubahan terutama pada indikator tujuan. Perubahan indikator tujuan dimaksudkan agar pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih sederhana, dapat diukur, realistis dan memiliki kerangka waktu serta merupakan indikator makro sebagai indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan.

Sasaran pada setiap misi pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 diadakan evaluasi sehingga terdapat perubahan-perubahan dari sebanyak 48 sasaran menjadi 21 sasaran, sebagai berikut :

1. Untuk mencapai misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional” maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
 - b. Meningkatnya kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. Terwujudnya ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi; dan
 - e. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Untuk mencapai misi “Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau” maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Meningkatnya akses prasarana dasar;
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - f. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan
 - g. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, penganekaragaman dan keamanan pangan.
3. Untuk mencapai misi “Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung lingkungan” maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah dengan berwawasan lingkungan, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya penanganan bencana alam; dan
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Untuk mencapai misi “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi & UMK;
 - b. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;

- c. Meningkatnya nilai investasi; dan
 - d. Meningkatnya kontribusi sektor terhadap PDRB.
5. Untuk mencapai misi “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan” maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
 - b. Meningkatnya penyelesaian konflik sosial di daerah; dan
 - c. Meningkatnya pengelolaan pemerintahan desa.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam hal ini menjalankan Misi I yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional” maka tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan keterbukaan informasi publik”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional melalui peningkatan keterbukaan informasi publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang menetapkan 3 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

TABEL – II.1**Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Persentase Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar TI	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%
2			Persentase pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50%
			Persentase permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD/Instansi/ Lembaga yang menerima media informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KIM berbasis IT	n/a	n/a	n/a	n/a	50%	75%
3		Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan pembangunan	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis di tahun 2018, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang didukung oleh 9 program dan 37 kegiatan, sebagai berikut :

1) Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- g) Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan
- h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i) Penyediaan Makanan Dan Minuman
- j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- k) Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- l) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c) Pengadaan meubelair
- d) Pengadaan Komputer
- e) Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon Dan Air
- f) Pengadaan Perlengkapan Kantor
- g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- h) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- d) Penyusunan Renja, RKA-DPA OPD

5) Program Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika

- a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
- b) Penunjang Operasional Telecenter

6) Program Pengembangan Dan Pembinaan Pos, Frekwensi Radio Dan Telematika

- a) Pendataan Pos dan Telekomunikasi Kabupaten

7) Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

- a) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi masyarakat
- b) Fasilitasi dan pembinaan pejabat pengelola informasi daerah

8) Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa

- a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- b) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- c) Penunjang operasional komisi penyiaran informasi daerah

9) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

- a) Penyusunan dan pengolahan data dan statistik daerah
- b) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
- c) Pengelolaan Data Elektronik Daerah

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka perlu dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun pada awal tahun anggaran. Perjanjian kinerja ini berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun

tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel - II.2
Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sampang Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Persentase Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar Teknologi Informasi	%	100
		Persentase pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas	%	50
		Persentase permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti	%	100
		Persentase OPD/Instansi/ Lembaga yang menerima media informasi	%	100
		Persentase KIM berbasis Teknologi Informasi	%	75
2	Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	%	100

Berdasar pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang mempunyai 2 (dus) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama

yang telah direncanakan dan disusun pada Tahun 2018 ini dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang mencerminkan kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan sekaligus mencerminkan kewajiban untuk menjawab mengenai hal-hal yang memerlukan jawaban. Dalam penjabaran akuntabilitas tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap komponen-komponen penting yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan maupun hambatan yang dialami selama suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2018 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada Tahun 2018 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja

kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian pencapaian kinerja setiap sasaran strategis dipergunakan skala penilaian pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut, terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran yaitu :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel. - III.1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> - 100	Sangat baik
3	75 - 100	Baik
2	55 - 75	Cukup Baik
1	< 55	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel. - III.2

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> - 100	Kurang
3	75 - 100	Cukup Baik
2	55 - 75	Baik
1	< 55	Sangat baik

Adapun target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. - III.3
Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sampang Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Persentase Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar Teknologi Informasi	%	100
		Persentase pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas	%	50
		Persentase permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti	%	100
		Persentase OPD/Instansi/Lembaga yang menerima media informasi	%	100
		Persentase KIM berbasis Teknologi Informasi	%	75
2	Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	%	100

B. CAPAIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018 memuat informasi tentang Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2018, Indikator Kinerja, Target atau Rencana Capaian Kinerja, Program serta Kegiatan.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat dinilai dan menjadi umpan balik (*feed back*) guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Hasil Pengukuran Kinerja setiap Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel. - III.4
Pencapaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Persentase Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar Teknologi Informasi	100%	24%	24%
		Persentase pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas	50%	77%	154%
		Persentase permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase OPD/Instansi/Lembaga yang menerima media informasi	100%	100%	100%
		Persentase KIM berbasis Teknologi Informasi	75%	68%	91%
2	Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%	100%	100%

C. ANALISISI CAPAIAN KINERJA

Masing – masing sasaran, ditetapkan indikator kinerja sebagai parameter pencapaian, dapat dijelaskan aspek keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 :

- Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika

Dijabarkan dalam 5 (lima) indikator sebagai berikut :

1. Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar Teknologi Informasi
2. Pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas
3. Permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti
4. KIM berbasis Teknologi Informasi

Tabel. - III.5
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Persentase Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar Teknologi Informasi	100%	24%	24%
		Persentase pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas	50%	77%	154%
		Persentase permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase OPD/Instansi/ Lembaga yang menerima media informasi	100%	100%	100%
		Persentase KIM berbasis Teknologi Informasi	75%	68%	91%

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh gambaran bahwa Indikator 1 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 24% yang mempunyai makna **Kurang**, Indikator 2 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 154%, yang mempunyai makna **Sangat**

Baik, Indikator 3 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 100% yang mempunyai makna **Baik**, Indikator 4 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 100% yang mempunyai makna **Baik**, Indikator 5 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 91% yang mempunyai makna **Baik**.

Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :
 - Pada Program/Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, semua Perangkat Daerah Sudah terkoneksi 100%. Kendala saat ini Indikator 1 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 24% dikarenakan SDM dibidang TI di organisasi perangkat daerah kurang sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak maksimal dan pemberdayaan terhadap Teknologi Informasi yang masih kurang. Masih banyak pelayanan administrasi dan pelayanan publik yang belum memanfaatkan teknologi informasi
 - Pada Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat di 14 kecamatan dan Pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sesuai dengan indikator kegiatan yang ditetapkan. Pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat dititik beratkan kepada penyampaian informasi dengan menggunakan teknologi informasi yaitu website, sehingga jangkauannya akan semakin luas.
 - Pada Program kerjasama informasi dan media massa, untuk pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan, talkshow dan diseminasi informasi melalui media cetak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga indicator yang ditetapkan dapat tercapai 100%
 - Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan menambah pegawai dengan mengangkat tenaga kontrak

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
 - Persentase terbesar Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah digunakan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi karena untuk era kedepan ini
2. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :
 - Program Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika dengan penambahan jaringan setiap tahunnya, pemeliharaan website dan pengamanan aplikasi untuk website dan pemberdayaan SDM yang ada
 - Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dengan melakukan pembinaan SDM baik untuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan Kelompok Informasi Masyarakat.

Sasaran 1 :

- ***Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan***

Dijabarkan dalam 1 (satu) indikator sebagai berikut :

1. Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan

Tabel. - III.6
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No.	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%	100%	100 %

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 100%, yang mempunyai makna Berhasil. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :

- Pada Program/Kegiatan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, semua dokumen statistik daerah dapat terpenuhi antara lain : Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, Tinjauan Ekonomi dan PDRB. Penyusunan data statistik masih bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, sehingga pelaksanaan kegiatan penyusunan data statistik menunggu kesiapan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang
 - Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan koordinasi dengan OPD terkait sehingga kegiatan penyusunan data statistik bisa disiapkan lebih awal
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
- Sumber daya manusia yang terbatas di Bidang Statistik dan Persandian sehingga pelaksanaan program dan kegiatan masih bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang
3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :
- Program/Kegiatan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan melaksanakan penyusunan data statistik yang tepat waktu.

D. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang tahun anggaran 2018 dapat terlaksana dengan baik sesuai target. Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian target sasaran rencana strategis sebagai berikut :

Realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD Tahun 2018 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel - III.8 Capaian Sasaran

Sasaran RPJMD			Satuan	2016	2017			
No.	Uraian	Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya peran kelembagaan dalam layanan informasi dan komunikasi	1	Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi	unit	30	59	52	88,14
		2	Jumlah Media Informasi Milik Pemerintah Daerah	Media	5	5	5	100
		3	Jumlah Media Informasi Milik Non Pemerintah Daerah	Media	29	72	50	69,44

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut (Penjelasan Masing-Masing Indikator Kinerja):

- a. Untuk Sasaran RPJMD dengan indikator jumlah Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi terealisasi 52 SIM dari jumlah target 59 SIM atau terealisasi 88,14 %. Hal ini dikarenakan masih ada Perangkat Daerah yang belum memiliki SIM yang terintegrasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. Untuk Sasaran RPJMD dengan indikator jumlah Informasi Media (media elektronik dan cetak) milik pemerintah daerah terealisasi 5 buah dari jumlah target 5 buah atau terealisasi 100%. Sedangkan untuk indikator jumlah Informasi Media milik non pemerintah daerah terealisasi 50 buah dari jumlah target 72 buah atau terealisasi 69,44%. Hal ini disebabkan masih banyak media cetak maupun online yang belum terverifikasi karena data belum masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang pada tahun 2018, Capaian Indikator Kinerja rata-rata yaitu 85,86%, menunjukkan **kinerja baik**.

E. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Pada awal tahun Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang tahun 2018 sebesar Rp. 5.277.194.000 dan dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 6.127.184.000. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang tahun anggaran 2018 dapat terlaksana dengan baik sesuai target.

Pada tabel berikut disajikan persentase Anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel - III.9
Alokasi per Sasaran Pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Persentase Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar Teknologi Informasi	5.904.384.000,00	96,36%
	Persentase pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas		
	Persentase permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti		
	Persentase OPD/Instansi/ Lembaga yang menerima media informasi		
	Persentase KIM berbasis Teknologi Informasi		
Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	222.800.000,00	3,64%
JUMLAH		6.127.184.000,00	100%

Pada tabel berikut disajikan Realisasi Anggaran pada masing-masing sasaran.

Tabel - III.10
Realisasi Anggaran per Sasaran

SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	5.904.384.000,00	5.116.817.722,00	86,66%
Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan	222.800.000,00	213.487.000,00	95,82%
JUMLAH	6.127.184.000,00	5.330.304.722,00	86,99%

Tabel - III.11
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sampang Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Persentase Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar Teknologi Informasi	100%	24%	24%	5.904.384.000,00	5.116.817.722,00	86,66%
	Persentase pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas	50%	77%	154%			
	Persentase permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
	Persentase OPD/Instansi/ Lembaga yang menerima media informasi	100%	100%	100%			
	Persentase KIM berbasis Teknologi Informasi	75%	68%	91%			
Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%	100%	100%	222.800.000,00	213.487.000,00	95,82%
JUMLAH					6.127.184.000,00	5.330.304.722,00	86,99%

Tabel - III.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Persentase Website unit-unit perangkat daerah yang aktif yang memenuhi standar Teknologi Informasi	24%	86,66%	7,14%
	Persentase pengunjung Website unit-unit pemerintah daerah yang puas	154%		
	Persentase permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti	100%		
	Persentase OPD/Instansi/ Lembaga yang menerima media informasi	100%		
	Persentase KIM berbasis Teknologi Informasi	91%		
Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk pembangunan	Persentase penyediaan data statistik dalam pembangunan	100%	95,82%	4,18%

Tabel - III.13
Pencapaian Realisasi ProgramKegiatan

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PENDAPATAN	5,000,000.00	11,791,000.00	236%
	Lain-lain PAD yg sah : fasilitas sosial dan fasilitas umum	5,000,000.00	11,791,000.00	236%
A	Belanja Tidak Langsung (BTL)	2,485,898,560.00	2,165,262,149.00	87.10
B	Belanja Langsung (BL)	6,127,184,000.00	5,330,304,722.00	86.99
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	649,924,000.00	617,958,974.00	95.08
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	9,620,500.00	96.21

1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	134,600,000.00	105,827,711.00	78.62
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9,800,000.00	7,318,900.00	74.68
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75,800,000.00	75,799,000.00	100.00
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48,354,000.00	48,149,915.00	99.58
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,345,000.00	15,340,000.00	99.97
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,240,000.00	15,240,000.00	100.00
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	16,200,000.00	16,123,820.00	99.53
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	240,865,000.00	240,833,128.00	99.99
1.11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	16,720,000.00	16,706,000.00	99.92
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	658,960,000.00	656,287,816.00	99.59
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	55,750,000.00	54,584,500.00	97.91
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	62,250,000.00	62,250,000.00	100.00
2.3	Pengadaan Meubeulair	78,250,000.00	78,250,000.00	100.00
2.4	Pengadaan Komputer	59,750,000.00	58,528,000.00	97.95
2.5	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	20,200,000.00	20,200,000.00	100.00

2.6	Pengadaan perlengkapan kantor	60,300,000.00	60,300,000.00	100.00
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200,000,000.00	199,818,290.00	99.91
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99,860,000.00	99,832,026.00	99.97
2.9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,600,000.00	22,525,000.00	99.67
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23,750,000.00	23,743,543.00	99.97
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	23,750,000.00	23,743,543.00	99.97
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26,000,000.00	25,880,000.00	99.54
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
4.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,000,000.00	2,980,000.00	99.33
4.4	Penyusunan Renja RKA - OPD dan DPA-OPD	10,000,000.00	9,900,000.00	99.00
5	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Informatika	3,455,920,000.00	2,800,533,673.00	81.04
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	3,397,920,000.00	2,755,017,720.00	81.08
5.2	Penunjang Operasional Telecenter	58,000,000.00	45,515,953.00	78.48
6	Program Pengembangan dan Pembinaan Pos Frekuensi Radio dan Telematika	0.00	0.00	0.00
6.1	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00

7	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	212,000,000.00	178,802,060.00	84.34
7.1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Masyarakat	136,000,000.00	115,921,060.00	85.24
7.2	Fasilitas dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah	76,000,000.00	62,881,000.00	82.74
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	877,830,000.00	813,611,656.00	92.68
8.1	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	778,000,000	715,391,856.00	91.95
8.2	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	0.00	0.00	0.00
8.3	Penunjang Operasional Komisi Penyiaran Informasi Daerah	99,830,000	98,219,800.00	98.39
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	222,800,000.00	213,487,000.00	95.82
9.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	80,000,000.00	79,704,000.00	99.63
9.2	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	65,000,000.00	64,760,000.00	99.63
9.3	Pengelolaan Data Elektronik Daerah	77,800,000.00	69,023,000.00	88.72
JUMLAH (BL+BTL)		8,613,082,560.00	7,495,566,871.00	87.03

Tabel - III.13
Output/Keluaran masing-masing Program dan Kegiatan

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	Output/Keluaran			
		Uraian	Target	Realisasi	%
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	101%	101%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang terkirim selama 1 Tahun	900 bh	920 bh	102%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Telepon, Listrik dan Air	96 rek	96 rek	100%
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Surat - surat Kendaraan Dinas	24 unit	22 unit	92%
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat dan Jasa Kebersihan Kantor	1.256 bh dan 96 org	1.812 bh dan 96 org	144%
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	2.173 bh	1428 bh	66%
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penggandaan dan Cetak	70.000 lbr dan 470 bh	52.364 lbr dan 464 bh	75%
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	375 bh	266 bh	71%
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	156 eks	176 eks	113%
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minuman Rapat	780 org	555 org	71%
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	130 org	168 org	129%
1.11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung / Honor	42 org	42 org	100%
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	92 org	132 org	143%

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%		103%
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas	3 unit	3 unit	100%
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	9 unit	9 unit	100%
2.3	Pengadaan Meubeulair	Tersedianya meubeulair	23 unit	23 unit	100%
2.4	Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer dan Printer	7 unit	7 unit	100%
2.5	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	Tambah daya, sambungan telepon dan sambungan air	2.000 watt	2.000 watt	100%
2.6	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	198 bh	283 bh	143%
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselesaikannya Pemeliharaan berkala gedung kantor	3 gedung	3 gedung	100%
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselesaikannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	3 unit	100%
2.9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terseleenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	102 unit	82 unit	80%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselesainya Pendidikan dan Pelatihan Formal	3 org	3 org	100%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	100%	100%
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Terselesainya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dok	1 dok	100%
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terselesainya Laporan Semesteran	2 dok	2 dok	100%
4.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terselesainya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	100%

4.4	Penyusunan Renja RKA - OPD dan DPA-OPD	Tersedianya dokumen RENJA SKPD, RKA dan DPA SKPD	3 dok	3 dok	100%
5	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Informatika	Web site milik pemerintah daerah (website)	60 unit	75 unit	125%
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terciptanya Sarana Prasarana Website dan Jaringan Pemerintah	5 Paket	4 Paket	80%
5.2	Penunjang Operasional Telecenter	Terlaksananya Kegiatan Telecenter	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
6	Program Pengembangan dan Pembinaan Pos Frekuensi Radio dan Telematika	Jumlah jaringan telekomunikasi	211	0	0%
6.1	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terselenggaranya Pengawasan dan Menara Telekomunikasi	0	0	0%
7	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase KIM yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%
7.1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Masyarakat	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat dan Terlaksananya Pekan	14 Kec	14 Kec	100%
7.2	Fasilitasi dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Pameran/Expo (kali)	1	1	100%
8.1	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Pameran Pembangunan, Talkshow dan Cetak Tabloid	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
8.2	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Papan Informasi, Bahasa Arab (Kalimat Toyyibah) dan PPSP	0	0	0%
8.3	Penunjang Operasional Komisi Penyiaran Informasi Daerah	Jumlah Kebutuhan Alat Studio Radio Suara Sampang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jenis dokumen statistik yang disusun	4 dok	4 dok	100%

9.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	DDA 2017, KDA 2017 dan Susenas 2016	DDA 80 exp, KDA 70 exp dan Susenas 80 exp	DDA 80 exp, KDA 70 exp dan Susenas 80 exp	100%
9.2	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tinjauan Ekonomi Makro Kabupaten Sampang (PDRB Kabupaten Sampang)	80 Exp	80 Exp	100%
9.3	Pengelolaan Data Elektronik Daerah	Sosialisasi dan Bimten Pengolahan Data elektronik	3 kali	3 kali	100%

BAB III

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2018 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas kepada Publik berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sasaran Strategis dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2018. Selain itu LKjIP ini disusun sebagai media pembelajaran bagi Dinas atas segala kinerja dan prestasi maupun kegagalan yang telah dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk hambatan maupun perubahan yang pasti dihadapi dimasa yang akan datang, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal diatas, maka wajar kiranya jika sikap responsif dan adaptif serta terbuka akan kritik maupun saran yang bersifat membangun selalu dikemukakan demi kesempurnaan penyusunan LKjIP yang akan datang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berisikan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dengan menuangkan dalam penetapan tujuan dan, sasaran dan indikator kinerja dan berpedoman pada Renstra 2013-2018 secara obyektif sekaligus menginformasikan capaian-capaian yang telah diraih secara transparan, logis dan akuntabel. Keseluruhan informasi akuntabilitas ini merupakan hal yang bersifat berkelanjutan (progresif) sehingga perlu secara terus-menerus dikaji, dikembangkan dan dievaluasi agar nantinya dapat diperoleh perangkat-perangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan logis serta didukung oleh pemberdayaan sumber daya yang ada.

Pengembangan sistem akuntabilitas ini nantinya secara teknis diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Dinas sendiri terhadap pelaksanaan tugas dan pengendalian fungsi-fungsi dinas secara menyeluruh yang akhirnya akan menjadi media yang efektif bagi pemerintah daerah maupun pimpinan untuk melihat dan menilai sampai sejauh mana keputusan-keputusan Strategis dinas mampu mengcover tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang,

C. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sebagaimana berikut :

1. Jangkauan internet yang belum sampai ke kecamatan dan desa;
2. Belum optimalnya Perangkat Daerah mengelola websitenya;
3. Pelayanan administrasi pemerintah dan pelayanan publik belum berbasis teknologi informasi.

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

1. Melakukan penambahan jaringan sehingga menjangkau kecamatan, desa dan pelayanan publik lainnya;

2. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan website terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan update data/informasi pada website <https://sampangkab.go.id>
3. Mendorong perangkat daerah untuk penerapan e-government pada pelayanan administrasi dan pelayanan publik.

E. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Saran :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sesuai tugas pokoknya menangani 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan Komunikasi dan Informatika dan urusan Statistik, oleh karena itu perlu mendapat alokasi anggaran yang proporsional, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif dan efisien dan pelayanan publik secara optimal.

2. Rekomendasi

Agar peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara on line dengan dukungan Teknologi Informasi di Kabupaten Sampang, maka diperlukan rekomendasi antara lain :

1. Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang proporsional, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.
2. Mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menerapkan e-government sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif dan efisien.

Sampang, Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB.SAMPANG

Drs. H. DJUWARDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19600707 198603 1 022